

Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Briefing Notes

Kunjungan dan Liputan Media ke Lokasi Program ICCTF di Kotawaringin Barat 5 - 7 Maret 2018

Program

Mitigasi Berbasis Lahan
ICCTF - Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin)

Desa Tanjung Tarantang dan Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Juni 2015, *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) bersama *United States Agency for International Development* (USAID) menandatangani perjanjian kerja sama dalam kerangka “USAID Support for Indonesia Climate Change Trust Fund” senilai 5.000.000 USD untuk melaksanakan program-program perubahan iklim yang fokus pada aksi mitigasi berbasis lahan serta adaptasi dan ketangguhan iklim dalam upaya mencapai target Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Hingga akhir tahun 2016, ICCTF telah melaksanakan 2 kali seleksi proposal program hibah USAID pada Oktober 2015 (*Batch I*) dan Oktober 2016 (*Batch II*). Dari seleksi proposal tahap I tersebut, ICCTF mengelola dan mendukung pendanaan 15 program yang terdiri atas 8 program mitigasi berbasis lahan dan 7 program adaptasi dan ketangguhan iklim yang telah dilaksanakan sejak bulan April 2016.

Program Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu dari dua puluh program mitigasi berbasis lahan yang dikelola oleh ICCTF. ICCTF memberikan pendanaan kepada Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) untuk mengimplementasikan program tersebut di Desa Tanjung Tarantang dan Tanjung Putri selama dua tahun dengan nilai program sebesar Rp 2.400.000.000,00.

Zona penyangga Suaka Margasatwa Lamandau (SM Lamandau) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, didominasi oleh hutan rawa gambut dengan potensi tinggi sebagai penyimpan karbon. Kedalaman gambutnya

mencapai rata-rata 134 cm. Terbukti sejak tahun 2010 terdeteksi persediaan karbon di atas permukaan tanah sebanyak 70-71 ton/ha (ICRAF, 2010) dan saat dilakukan pengukuran kembali pada Maret 2018 tercatat sekitar 73 ton/ha (GAIA, 2018). Ada penurunan emisi sekitar 2-3 ton/ha atau rata-rata 2,5 ton/ha. Sedangkan persediaan karbon di bawah permukaan tanah sebesar 841 ton/ha (ICRAF, 2010).

Kawasan hutan rawa gambut yang tersebar di area penyangga bagian timur SM Lamandau dengan luas sekitar 23.000 ha ini adalah sisa kawasan hutan bergambut yang masih mempunyai tutupan vegetasi yang baik (kerapatan tinggi) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan ini berperan penting sebagai kawasan penyimpan karbon/penyerap emisi karbon di Kabupaten Kotawaringin Barat, selain kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, hutan *mangrove* di wilayah pesisir dan ekosistem lamun di Perairan Senggora-Sepagar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kawasan dengan tipe hutan rawa sekunder bergambut diselingi ekosistem nipah di wilayah penyangga SM Lamandau selain rumah bagi satwa dilindungi dan endemik Borneo (diantaranya Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus wurmbii*) dan Bekantan (*Nasalis larvatus/Proboscis monkey*), juga merupakan kawasan penting penunjang kehidupan bagi masyarakat yang berada di desa sekitar kawasan penyangga. Masyarakat sekitar masih bergantung pada sumberdaya hutan non kayu, seperti ikan sungai/rawa bergambut yang khas diantaranya Toman, Haruan/Gabus, Baung, Lais, Tapah, Pepuyu/Betok, Kapar dan Tebakang serta Lele Rawa; kemudian getah Jelutung (Pantung) dari pohon Jelutung Rawa sejenis Karet Hutan (*Dyera sp./ black rubber/wild rubber*), Rotan, Nipah, buah hutan dan jasa lingkungan seperti air bersih dan udara segar.



Untuk kelestarian sumberdaya hutannya dan memberikan benefit berkelanjutan bagi mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan penyangga SM Lamandau serta membangun keterlibatan masyarakat dalam mendukung perlindungan dan pelestarian kawasan hutannya, Yayasan sejak 2012 mendorong masyarakat membentuk kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang nantinya kelompok HKm berperan aktif mengelola dan menjaga kawasan hutan secara lestari.

Skema HKm dipilih sebagai strategi untuk mempertahankan kawasan hutan bergambut penyangga SM Lamandau tidak beralih fungsi guna peruntukan area perluasan perkebunan sawit dan mempertahankan hutan rawa bergambutnya sebagai area penyimpan/penyerap emisi karbon.

Kawasan ini memberi manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Gambaran potensi di atas perlu terjaga kelestariannya, sehingga pengembangan manfaat jasa ekologi, ekonomi lingkungannya terus memberi nilai berkelanjutan dan mengurangi/bahkan menghilangkan tekanan aktivitas yang berdampak pada kerusakan ekosistem di kawasan penyangga.

Dalam mendukung rencana pengelolaan SM Lamandau dan mitigasi-adaptasi perubahan iklim serta mendorong kawasan hutan penyangga SM Lamandau sebagai kawasan HKm dan penyerap emisi karbon, ICCTF-USAID mendukung pendanaan program konservasi ekosistem nipah dan hutan penyangga bagian timur SM Sungai Lamandau sebagai kawasan pencadangan HKm yang diimplementasikan oleh Yayasan Orangutan Indonesia atau Yayasan.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melakukan rehabilitasi lahan terdegradasi seluas 400 ha dengan 40 ribu tanaman hutan rawa gambut sebanyak 17 jenis, salah satunya Jelutung, sebab Jelutung salah satu jenis pohon yang paling direkomendasikan untuk penghijauan/revegetasi dan pengayaan kawasan hutan rawa bergambut. Pohon Jelutung tercatat mampu menyerap emisi karbon 77 ton/ha dan kawasan nipah mampu menyimpan 28 ton karbon/ha (ICRAF, 2010). Kemudian mendapatkan dukungan Bupati Kotawaringin Barat berupa rekomendasi dan pernyataan untuk penyangga bagian timur SM Lamandau kawasan sebagai kawasan pencadangan HKm, mendorong Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Balai PSKL), Ditjen PSKL Kementerian LHK melakukan verifikasi dan mendorong kelompok mengajukan usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Selain itu peningkatan kapasitas pengelolaan lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan kawasan hutan, pemetaan potensi kawasan HKm, merancang rencana kerja tahunan kelompok HKm, pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan yang melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai satuan unit di masyarakat yang nantinya mendukung upaya pencegahan/pemadaman karhutla serta upaya membangun contoh pertanian organik tanpa bakar dan perikanan lokal berkelanjutan dalam bentuk Keramba Jaring Apung (KJA) dan Kolam Terpal juga model pengembangan usaha kelompok yang berkelanjutan juga dilakukan.

Desa Tanjung Putri, sebuah desa yang terletak di sebelah Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan desa dengan penduduk mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian kecil menjadi petani, pedagang, dan kelompok tani hutan. Desa ini dibentengi dengan rumpun ekosistem nipah seluas kurang lebih 257 ha, yang menjadi ciri khas unik desa ini. Ekosistem nipah ini perlu pengelolaan yang baik, agar tidak rusak karena fungsinya sebagai benteng pelindung pemukiman Desa Tanjung Putri yang menjaga ketersediaan air tanah, menjaga abrasi daratan, melindungi dari hembusan angin laut, dan memberi sumberdaya hayati ekonomis .

Selain kegiatan penanaman, program yang didukung ICCTF-USAID ini juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di desa Tanjung Putri dalam pemanfaatan nira nipah dan pengolahan ikan/udang dari hasil Keramba Jaring Apung yang dibangun di sisi Sungai Lamandau, Nira dari nipah tersebut dapat diolah menjadi gula merah berkualitas.

Selain pemanfaatan nira, kelompok perempuan di desa ini memanfaatkan tulang daun nipah menjadi bahan untuk sapu lidi. Daging buahnya menjadi suguhan segar berupa es buah nipah, jika kita berkunjung menjadi tamu ekowisata ke desa ini. Banyak potensi tumbuhan nipah ini, selain untuk panganan juga untuk material atap rumah, bungkus ketupat, lampit/tikar. Ekosistemnya juga merupakan daerah terbaik berpijah dan tumbuh bagi biota perairan bernilai ekonomis, seperti udang galah, ikan kakap putih, ikan lokal lainnya.

Secara keseluruhan, program ini mendapat dukungan positif dari para pihak di kabupaten Kotawaringin Barat, diantaranya Kepala Desa Tanjung Putri menyatakan melalui Bumdes siap mendukung pengembangan usaha kelompok dalam mendukung konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Bappeda Kotawaringin Barat juga menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka program ICCTF-Yayorin sesuai dalam visi misi RPJMD Kotawaringin Barat.

FAKTA PROGRAM

Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

ALAMAT MITRA PELAKSANA

Jl. Bhayangkara KM 1, Pangkalan Bun 74112, Kalimantan Tengah
Tel: (0532) 290 57 | Fax: (0532) 290 81 | E: info@yayorin.com

TUJUAN

Program ini bertujuan untuk mendukung pengurangan emisi melalui kegiatan perlindungan dan rehabilitasi pada kawasan gambut, kawasan konservasi, dan ekosistem mangrove (nipah) di blok hutan penyangga bagian timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau. Secara rinci berikut tujuan program ini:

1. Terehabilitasinya kawasan hutan terdegradasi seluas 20 ha;
2. Meningkatnya tingkat ekonomi kelompok HKm di hutan penyangga SM Sungai Lamandau di blok Sungai Buluh dan Sungai Pengkajangan, Desa Tanjung Putri, Kalimantan Tengah;
3. Terlindunginya 200 ha ekosistem mangrove-nipah dan 2.000 ha hutan penyangga SM Sungai Lamandau di blok hutan Sungai Buluh & Sungai Pengkajangan melalui Peraturan Desa Tanjung Putri dan Rekomendasi Bupati untuk Pencadangan kawasan Hutan Kemasyarakatan.

WAKTU PELAKSANAAN

April 2016 - Maret 2018 (24 bulan)

ANGGARAN

Rp 2.400.000.000,00
(Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

LOKASI

Desa Tanjung Terantang dan Desa Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

KELUARAN

1. Tertanamnya 40.000 pohon Jelutung & lainnya di 400 ha lahan.
2. Tersusunnya Perdes Desa Tanjung Putri untuk perlindungan ekosistem nipah/mangrove & hutan penyangga.
3. Terbangunnya 20 Keramba Jaring Apung untuk budidaya ikan sungai endemik Kalimantan Tengah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat kelompok HKm tentang sistem pengelolaan dan pengawasan HKm wilayah blok penyangga.
5. Tersusunnya rekomendasi Bupati Kotawaringin Barat untuk pencadangan kawasan HKm diajukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Terbentuknya Kelompok Usaha alternatif bagi kelompok HKm dan kelompok Wanita Pendukung HKm (Wanita Mandiri).
7. Meningkatkan pemahaman 25% dari 300 orang Kepala Keluarga yang bertani tentang berladang menetap tanpa bakar.
8. Rerata penurunan emisi/tahun 8.250 ton CO₂eq.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan penerima manfaat (*beneficiaries*) program:

- Kelompok HKm SEPAKAT
- Kelompok Ibu-Ibu Pengolah Nipah
- Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Tanjung Putri
- Kepala Desa Tanjung Putri
- Kepala BPBD Kotawaringin Barat
- Kepala BKSDA Kalteng-SKW II Pangkalan Bun
- Dinas TPHP (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
- Dinas Ketahanan Pangan
- Camat Arut Selatan
- KPHP Kotawaringin Barat





PROFIL

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (*Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF*) merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian di Indonesia untuk perubahan iklim yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia. ICCTF didirikan pada tanggal 14 September 2009 dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Tujuan kelembagaan ICCTF adalah mengarusutamakan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mengimplementasikan kegiatan mitigasi dan adaptasi penurunan emisi GRK. Dengan mendorong dan menyalurkan sumber daya domestik dan pendanaan internasional ke proyek-proyek yang selaras dengan rencana pelaksanaan RAN/RAD-GRK, ICCTF mendukung target penurunan emisi Indonesia sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030.

Dalam periode 2016-2018, ICCTF mendanai 18 program penanganan perubahan iklim di berbagai lokasi di Indonesia, sesuai dengan tiga fokus area lembaga, yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan peningkatan ketahanan. Dalam periode 2010-2016, program penanganan perubahan iklim yang telah didanai oleh ICCTF sebanyak 36 program. Mitra pelaksana kegiatan-kegiatan ICCTF tersebut adalah Kementerian/Lembaga, LSM, dan Universitas. Tahun 2017 ICCTF menyalurkan pendanaan ke 27 lembaga yang telah lulus seleksi proposal. 11 lembaga terpilih untuk program ICCTF-UKCCU, 12 proposal lembaga terpilih untuk program ICCTF-USAID Mitigasi Berbasis Lahan, dan 4 proposal lembaga terpilih untuk program ICCTF-USAID Adaptasi dan Ketahanan.

Informasi selengkapnya kunjungi www.icctf.or.id

Narahubung:
Adhi Fitri Dinastiar
Communication Officer
(adhis.dinastiar@icctf.or.id)
(+6282 22 685 4874)